

KEES GROENEBOER

## Politik Bahasa Kolonial di Asia\* Bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris dan Prancis

Politik bahasa yang dilaksanakan di bekas koloni-koloni Belanda sampai saat ini kurang mendapat perhatian. Ini berlaku tidak hanya bagi politik mengenai Bahasa Belanda, tetapi juga mengenai bahasa-bahasa pribumi, baik di Hindia Timur yakni Hindia Belanda (Indonesia), Malaka (Malaysia), Sailan (Sri Lanka), dan Afrika Selatan, maupun di Hindia Barat yakni Suriname dan Antillen-Belanda. Namun perhatian untuk politik bahasa kolonial ini masih menarik, karena politik bahasa dewasa ini di wilayah-wilayah tersebut merupakan cerminan dari keadaan pada masa kolonial.

Pada umumnya, masyarakat kolonial di satu pihak ditandai dengan lapisan atas kaum imigran dan keturunan mereka dengan bahasa dan budaya yang relatif homogen; di pihak lain terdapat masyarakat pribumi yang bahasa dan budayanya relatif heterogen. Bagaimana penyesuaian dan perubahan budaya terjadi tentu saja bergantung pada sikap para kolonialis. Para kolonialis dapat melaksanakan politik asimilasi dengan menawarkan atau menerapkan bahasa dan budaya mereka kepada penduduk dengan tujuan untuk mencapai suatu homogenitas. Dalam hal ini terjadi imperialisme bahasa dan budaya. Para kolonialis juga dapat melaksanakan suatu politik yang justru menjaga keutuhan budaya dan keanekaragaman bahasa, misalnya karena rasa hormat terhadap kekayaan bahasa dan budaya, atau karena politik *divide et impera* (politik pecah belah). Tentu saja bentuk campuran dari dua macam politik ini dapat muncul. Misalnya dilaksanakannya politik yang mencoba untuk mengasimilasikan kelompok elite pribumi pada bahasa dan budaya kolonial, sementara keanekaragaman budaya dan bahasa dari berbagai suku pribumi tetap dihormati dan diperhatikan (Van Doorn 1995:

---

\*Artikel ini dipublikasikan lebih dahulu dalam bahasa Belanda (Groeneboer 1998b). Isinya merupakan lanjutan dari tulisan Groeneboer yang telah diterbitkan dalam *Wacana* Vol. 1 No. 1, 1999. Terjemahan oleh Drs. Christina Suprihatin.

104–29).

Pertanyaannya adalah mengapa bahasa Belanda di Indonesia tidak menjadi bahasa pergaulan, sementara bahasa-bahasa Barat lainnya memainkan peranan yang lebih besar di Asia. Bertentangan dengan bahasa Belanda di Indonesia, bahasa Spanyol dan bahasa Inggris di Filipina, bahasa Prancis di Vietnam, Kamboja, dan Laos, dan terutama bahasa Inggris di India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Birma, Malaysia, dan Singapura, sekarang masih merupakan faktor yang penting.

Dari bahasa-bahasa Eropa yang pernah memainkan peran kolonial di Asia—bahasa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis—empat di antaranya sekarang termasuk dalam kelompok 12 bahasa supranasional di dunia (De Swaan 1993: 220–1). Politik bahasa Belanda tidak berhasil untuk menjadikan bahasa Belanda satu dari kelompok 12 bahasa itu, tetapi justru mendorong bahasa Melayu masuk dalam kelompok tersebut. Untuk dapat mengerti posisi bahasa Belanda pada wacana kolonial dengan lebih baik, akan digambarkan juga posisi bahasa-bahasa kolonial 'di sekitarnya', yaitu bahasa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Prancis.

#### BAHASA BELANDA DI HINDIA BELANDA

Perbedaan politik bahasa kolonial di Hindia Timur dan Hindia Barat mencolok. Di Suriname, sejak paruh kedua abad ke-19 dilaksanakan suatu kebijakan yang mengarah pada asimilasi. Dari suatu masyarakat yang multietnik, dengan penduduk yang berasal dari empat benua, dicoba untuk diciptakan suatu masyarakat yang berbahasa dan berbudaya satu. Bahasa pengantar pendidikan adalah bahasa Belanda dan pembelandaan yang dilaksanakan mengakibatkan hampir seluruh penduduk Suriname berbahasa Belanda pada waktu Suriname merdeka pada 1975 (Eersel 1997; Gobardhan-Rambocus 1997).

Di Antillen-Belanda, meskipun banyak diskusi tentang 'masalah bahasa pengantar', sampai akhir 1950-an bahasa Belanda tetap menjadi bahasa pengantar eksklusif di bidang pendidikan. Walaupun sekarang terutama peran bahasa Papiamento dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan di masyarakat semakin bertambah besar, bahasa Belanda tetap menjadi bahasa dominan dalam pemerintahan dan pendidikan (Rutgers 1997; Van Putte 1997).

Di Indonesia justru terjadi politik bahasa dan pendidikan yang berlawanan dengan Hindia Barat. Asimilasi seluruh penduduk pribumi justru tidak pernah dipilih dan malah diputuskan untuk tidak menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan di Nusantara. Pada kurun 1850-an ada diskusi panjang lebar mengenai keinginan untuk menyebarkan bahasa Belanda di antara penduduk pribumi. Secara eksplisit politik bahasa dan pendidikan seperti yang dilakukan orang Inggris di Hindia Inggris ditentang, dan pendidikan Barat pada 1854 ditolak (Groeneboer 1995:162-89).

Penyebaran pengetahuan Barat yang tidak terkontrol melalui suatu bahasa Eropa akan dapat mengancam keberadaan koloni, sebab meskipun penyebaran yang besar bisa menawarkan masa depan yang menarik bagi pasar buku Belanda, 'kesadaran moral dan politik' penduduk pribumi tidak bisa terkendali lagi kalau buku-buku berbahasa Belanda dipasarkan secara bebas. Namun, lambat-laun penyebaran bahasa Belanda yang terbatas pada lapisan atas penduduk dianggap bermanfaat, terutama untuk fungsi-fungsi dalam dunia usaha yang semakin besar dan aparat pemerintah yang semakin luas. Hal itu terutama terjadi pada perempat terakhir abad ke-19. Perkembangan dan pembudayaan dalam arti Barat kaum elite pribumi akan bermanfaat bagi pemerintahan, meningkatkan saling pengertian dan rasa percaya, dan oleh karena itu loyalitas kepada pemerintah kolonial akan meningkat.

Dengan mempertimbangkan hal itulah, pada awal abad ke-20 kesempatan untuk mengikuti pendidikan berbahasa Belanda pada penduduk pribumi diperbesar, tetapi perluasannya masih saja bergantung pada pasar kerja. Kelebihan jumlah penduduk pribumi yang berbahasa Belanda akan dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat dan ketidaktentraman. Lagi pula pendidikan Barat pada skala besar secara finansial dianggap tidak mungkin, karena pendidikan Barat harus dilaksanakan sepenuhnya menurut norma-norma sistem pendidikan di Negeri Belanda. Dalam diskusi politik bahasa terus-menerus muncul gambaran menakutkan mengenai pelecehan terhadap bahasa Belanda—seperti yang terjadi di Afrika Selatan—and dari berkembangnya semacam bahasa Belanda-Indo yang dipakai umum.

Oleh karena itu, di Hindia Timur dipilih pendekatan pluralistik. Di satu pihak dicoba untuk mengikat kelompok kecil elite pribumi pada para kolonialis dengan menawarkan pendidikan Barat dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Di pihak lain, sejauh ada pendidikan yang diberikan kepada penduduk pribumi lainnya, dipilih bentuk pendidikan pribumi dengan salah satu bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dan apabila itu tidak praktis maka digunakan bahasa Melayu. Sejak 1865 pendidikan dasar sudah diberikan dalam lima bahasa pengantar yang berbeda, pada 1900 dalam 13 bahasa, dan pada 1940 dalam 30 bahasa pengantar. Berkaitan dengan hal itu studi bahasa dengan tujuan penyusunan tata bahasa, kamus-kamus, dan bahan ajar selalu mendapat banyak perhatian. Politik bahasa dan pendidikan secara umum menolak penyebaran bahasa Belanda, dan juga bahasa Melayu; tetapi pada saat yang bersamaan mendorong penggunaan berbagai bahasa daerah. Politik bahasa ini dikenal sebagai "perwujudan politik kolonial *divide et impera*" (Bakker 1947: 58). G.L. Cleintuar memformulasikan politik kolonial itu sebagai berikut:

Politik pendidikan dan politik bahasa, diikuti oleh politik pengangkatan, penempatan, dan kenaikan, dengan sadar maupun tidak, telah membagi kelompok-kelompok penduduk di Hindia Belanda berdasarkan ukuran "cocok" atau tidaknya untuk mendapat pendidikan Belanda dalam bahasa Belanda. Dengan demikian orang Indonesia-Kristen (Amboin, Manado, Cina-Kristen, dan sebagainya) menjadi lebih Belanda daripada orang Indonesia yang lain dan dengan demikian orang Indo merasa menjadi [...] lebih Eropa daripada sebelumnya. Dengan demikian, kelompok-kelompok penduduk Hindia Belanda setelah 1900, satu dengan lainnya menjadi "lebih berbeda" dari sebelumnya (Cleintuar 1990: 67).

Meskipun desakan dari pihak pribumi semakin besar untuk menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk mempelajari bahasa Belanda, politik bahasa penghalang ini sampai Perang Dunia II tidak lagi diubah. Oleh sebab itu pada 1940 hanya dua persen dari penduduk mengenal bahasa Belanda (Groeneboer 1995: 377–82). Berarti pada akhir masa kolonial kurang lebih satu juta orang dari jumlah penduduk 70 juta menguasai bahasa Belanda dengan baik, sedangkan setengah juta orang lagi memiliki kemahiran bahasa yang terutama reseptif. Dilihat dari segi masyarakat, satu setengah juta orang Indonesia yang berbahasa Belanda berarti setiap orang Belanda dewasa di Nusantara berhadapan dengan delapan orang Indonesia yang berbahasa Belanda (60% di antaranya laki-laki dan 40% perempuan). Lagi pula jumlah satu setengah juta orang Indonesia yang berbahasa Belanda ini pada waktu itu merupakan sepuluh persen dari jumlah total 15 juta penutur bahasa Belanda di seluruh dunia.

Hampir semua penutur itu ditemukan di kota-kota dan di sanalah bahasa Belanda berkepentingan. Tidak hanya diciptakan suatu elite pribumi yang berbahasa Belanda – dokter, insinyur, pejabat pemerintahan dan guru untuk pendidikan Barat – tetapi juga lapisan menengah dengan penguasaan reseptif bahasa Belanda, cukup untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas, juru tulis, pegawai rendahan, guru pada pendidikan pribumi, perawat, pramuniaga, pegawai pada kantor pos dan telepon, dan sebagainya. Di luar kota besar, bahasa Belanda bahkan hampir-hampir tidak dikenal.

Sesudah gerakan nasionalis pada 1928 memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Republik Indonesia pada masa kemudian, sesungguhnya pada banyak orang Belanda baru muncul pertanyaan apakah ada cukup perhatian yang diberikan kepada pengalihan bahasa dan budaya Belanda. Yang mengesankan adalah penilaian mengenai politik bahasa dan budaya Hindia Belanda yang dilakukan oleh guru besar Prancis G. H. Bousquet pada 1939, yang menyatakan keheranannya mengenai ketidakpedulian orang-orang Belanda terhadap bahasa dan budaya mereka sendiri:

Dutch colonial policy has never for a moment considered that the Dutch language could play a part in the culture and civilization to be given to the native. On the contrary, by opposing him with a language intended to mark the distance which sets him apart from the European, the Dutch have striven and still strive, though vainly, to deprive their ward of

contact with the outside world (Bousquet 1940: 89).

Menurut Bousquet, karena orang Belanda sendirilah, kaum nasionalis memilih bahasa Melayu sebagai senjata untuk memerangi pengaruh Belanda. Berdasarkan pendapat itulah muncul diskusi hangat mengenai politik bahasa dan budaya Belanda di Hindia Belanda. Hasilnya, menjelang Perang Dunia II dirumuskan kebijakan dua arah; bahasa Melayu dan bahasa Belanda seharusnya mendapat tempat yang sama sebagai bahasa asing pada pendidikan pribumi, sedangkan salah satu bahasa daerah harus digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu harus dipelajari sebagai penguat kesatuan budaya intern Nusantara, dan bahasa Belanda karena difungsikan sebagai penguat kontak ekstern dengan Barat. Politik bahasa yang baru itu tidak memperoleh kesempatan lagi karena serangan Jepang pada bulan Maret 1942. Juga setelah Perang Dunia II masih diusahakan untuk menjadikan bahasa Melayu maupun bahasa Belanda sebagai mata pelajaran – bahasa Melayu untuk perkembangan Indonesia pada masa kemudian, dan bahasa Belanda sebagai jalan yang paling langsung menuju budaya Barat dan untuk kontak dengan dunia luar – tetapi tentu saja karena kejadian-kejadian politik, hal itu tidak ada yang terlaksana.

Ternyata setelah Perang Dunia II pun tidak banyak apresiasi untuk politik bahasa di Hindia Belanda. Pakar bahasa K. Heeroma, yang pada 1949–1952 menjabat sebagai guru besar linguistik Belanda di Universitas Indonesia, menyatakan pada akhir 1952 dengan penuh penyesalan:

Lain dari orang Inggris dan Prancis, orang Spanyol dan Portugis, para kolonialis Belanda mengajarkan bahasa ibu mereka [...] lebih banyak sebagai bahasa gengsi dari kelompok elite daripada sebagai bahasa pergaulan yang praktis, dan sebagai bahasa dunia yang potensial. [...]. Bahasa Belanda terlalu dibudayakan berdasarkan norma-norma dari tanah air, karena mereka sendiri ketakutan akan terjadi kreolisasi kalau dipakai di lingkungan yang lebih luas (Heeroma 1957: 71).

Kurang lebih 30 tahun sesudahnya, pakar bahasa M. C. van den Toorn (1985: 2) juga kurang terkesan dengan politik bahasa kolonial Belanda dan berpendapat, “pemerintah melakukan segala upaya untuk merintangi kemungkinan, bahwa bahasa Belanda pada suatu saat akan menjadi bahasa dunia.”

### BAHASA PORTUGIS DI ASIA

Sebelum kedatangan kekuatan Eropa lainnya, bahasa Portugis di Asia menjadi bahasa *lingua franca* dan berfungsi sebagai bahasa pergaulan antaretnik, sebagai bahasa kontak antara orang Eropa dan banyak bangsa Asia, dan sebagai bahasa pergaulan antarorang Eropa yang berasal dari berbagai negara. Pada abad ke-16, ke-17, dan ke-18 bahasa Portugis mengalami penyebaran yang besar di Asia (Lopes 1969). Bersatunya Gereja dan Negara di

Portugal, bersama-sama dengan keterikatan yang kuat terhadap bahasa sendiri, menjamin penyebaran yang aktif agama Katolik dalam bahasa Portugis, di mana pun juga orang Portugis datang (Huylebrouck 1989: 157–63). Karena kebutuhan akan bahasa Portugis Tinggi (ragam tulis) di Asia sedikit, di banyak daerah lambat-laun muncul bahasa Portugis dalam bentuk kreol, dengan kosakata yang terbatas dan tata bahasa yang disederhanakan, dan memakai banyak unsur dari *lingua franca* Melayu dan berbagai bahasa pribumi. Bahasa Portugis kreol ini menjadi bahasa ibu dari sekelompok besar keturunan budak yang terutama berasal dari Hindia Depan (Sailan dan India), misalnya di Sailan dan Batavia (Dalgado 1900, 1936; Schuchardt 1891). Semua orang Eropa, dari Portugal atau bukan, yang masuk ke pasar Asia, menyesuaikan diri dengan *lingua franca* yang sudah ada. Baru setelah perluasan kekuasaan orang Inggris di Asia pada akhir abad ke-18, fungsi bahasa Portugis sebagai *lingua franca* diambil alih oleh bahasa Inggris. Sesudah abad ke-18 bahasa Portugis dengan cepat menghilang dari sebagian besar Asia.

Bawa bahasa Portugis tetap tergolong 12 bahasa terbesar di dunia tentu saja pertama-tama karena Brazilia. Negara ini bagi Portugal seperti fungsi Amerika Serikat bagi Inggris. Belanda tidak pernah melaksanakan kolonisasi sebesar itu di mana pun di dunia, mungkin dengan pengecualian di Afrika Selatan. Juga negara-negara bekas jajahan Portugis di Afrika memilih bahasa Portugis sebagai bahasa resmi sesudah kemerdekaan mereka (1974), terutama karena banyaknya bahasa pribumi menciptakan keinginan akan satu *lingua franca*, suatu bahasa kesatuan (Huylebrouck 1989: 166–8).

#### **BAHASA SPANYOL DI FILIPINA**

Apabila di bagian Asia lain agama Katolik menyebar bersama dengan bahasa Portugis, di Filipina Spanyol (1565–1898) penyebarannya harus dengan bahasa Spanyol sesuai dengan politik bahasa yang dimaklumatkan Spanyol untuk koloni-koloninya. Sejak akhir abad ke-15 Kristenisasi selalu bersamaan dengan Kastelianisasi, dan itu juga berlaku bagi Spanyol Baru (Meksiko, Venezuela, dan Amerika Tengah). Untuk membuat penduduk pribumi tunduk kepada Tuhan dan Raja Spanyol, agama dan ideologi Kastilia harus diajarkan dalam bahasa Spanyol. Pada 1550 Raja Karel V dengan tegas memutuskan bahwa di seluruh wilayah Spanyol di penjuru dunia agama Katolik harus disebarluaskan dalam bahasa Spanyol. Tak satu pun bahasa pribumi dianggap cocok untuk dapat menyatakan kehalusan agama Katolik, apalagi hanya bahasa Spanyol yang dapat menjamin bahwa kebudayaan Spanyol akan dapat dialihkan.

Pelaksanaan politik bahasa dan agama itu selanjutnya diserahkan kepada para misionaris, tetapi tidak banyak yang dihasilkan dari politik resmi itu. Para misionaris menganggap tugas utama mereka adalah menyebarkan

agama, dan hal itu sebaiknya dilaksanakan dalam bahasa ibu. Sebetulnya tugas mereka bukan untuk menyebarluaskan bahasa Spanyol, yang fungsinya untuk lebih mengontrol penduduk pribumi secara langsung oleh para kolonialis. Perintah yang berulang-ulang dari tanah air, yang menuntut para misionaris untuk menghentikan pemakaian bahasa daerah, dan untuk menyebarluaskan bahasa Spanyol kepada penduduk pribumi, demi kepentingan negara dan untuk mempertegas superioritas dan otoritas Spanyol, hampir tidak memberikan hasil. Di dalam praktik pendidikan berbahasa Spanyol di Meksiko hanya untuk kaum imigran Spanyol dan untuk sejumlah pribumi dari kelompok elite dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan ahli juru bahasa, juru tulis, atau fungsi rendahan lainnya pada pemerintah (Heath 1972: 5–55). Sampai dengan kemerdekaan Meksiko pada 1821 tidak terjadi banyak perubahan pada situasi itu. Ketika kelompok Kreol, yaitu kaum keturunan para imigran Spanyol, mengambil alih kekuasaan, bahasa Spanyol masih tetap hanya digunakan oleh kelompok penduduk Kreol, yang jumlahnya 40% dari keseluruhan penduduk, dan oleh sekelompok kecil elite pribumi. Penguasa baru pada 1875 memutuskan menjadikan bahasa Spanyol sebagai bahasa baku dan bahasa pengantar resmi di bidang pendidikan, dengan bentuk yang sedikit dimeksikokan; kosakata, pengucapan, dan ejaannya karena pengaruh bahasa-bahasa pribumi disesuaikan dengan situasi Meksiko. Bahasa Spanyol-Meksiko menjadi simbol persatuan negara, sedangkan banyak bahasa pribumi justru dilihat sebagai ancaman (Heath 1972: 74, 182–3).

Filipina yang pada awalnya diperintah dari Meksiko mengikuti contoh koloni-koloni Spanyol yang lainnya. Meskipun secara resmi di Filipina juga dilaksanakan politik bahasa yang probahasa Spanyol, pendidikan berbahasa Spanyol selama hampir 300 tahun hanya terbatas pada anak-anak orang Spanyol dan kaum Mestis dan sekelompok kecil elite pribumi. Sejauh pendidikan (agama) diberikan, pendidikan itu dilaksanakan dengan bantuan bahasa-bahasa pribumi. Baru pada paruh kedua abad ke-19 ada dorongan dari Spanyol – setelah kemerdekaan Meksiko, Filipina langsung diperintah dari Spanyol – untuk lebih aktif menyebarluaskan bahasa Spanyol. Sesudah wajib belajar dimulai pada 1863 – sesuatu yang tidak pernah terjadi di Hindia Belanda – barulah bahasa Spanyol ditentukan sebagai bahasa pengantar di bidang pendidikan. Dengan tegas bahasa Spanyol dipropagandakan karena bahasa itu merupakan jalan menuju pengetahuan Barat. Untuk tujuan itu dimaklumkan beberapa peraturan, misalnya pengangkatan sebagai pegawai negeri tergantung dari kemahiran berbahasa Spanyol. Oleh karena itu bagi penduduk pribumi pengetahuan bahasa Spanyol secara sosial-ekonomi menjadi sarana untuk maju (Nieuwenhuis 1923: 190; Neys 1945: 75–8).

Hasil dari politik bahasa itu adalah pada 30 tahun terakhir masa kekuasaan Spanyol, peran bahasa Spanyol menjadi jauh lebih besar. Pada 1885 sepuluh persen dari anak sekolah dapat berbicara dalam bahasa Spanyol.

Pengetahuan bahasa Spanyol terutama dimiliki oleh kaum elite di kota-kota besar, terutama Manila, dan di daerah-daerah yang telah dikristenkan (Neys 1945: 78). Bahasa Spanyol menjadi bahasa kaum elite dan dengan demikian mencapai suatu prestise yang terus bertahan lama setelah masa Spanyol. Meskipun pada tahun 1898 secara radikal bahasa Spanyol dihapuskan dari pelajaran sekolah, pada sensus penduduk tahun 1918 terbukti bahwa paling sedikit 27% dari anak laki-laki di sekolah yang berusia di atas sepuluh tahun dapat membaca dan menulis dalam bahasa Spanyol, dan dari anak perempuan jumlahnya 14,5%. Nieuwenhuis (1923: 200) mengevaluasinya:

Pada kelas sosial tinggi bahasa Spanyol menjadi bahasa yang berkuasa, dipergunakan dengan baik sekali oleh sejumlah besar orang Filipina, bahasa-bahasa rakyat dipenuhi unsur-unsur bahasa Spanyol, dan sudah berabad-abad lamanya seluruh masyarakat mengenal budaya Spanyol.

Namun, pengetahuan bahasa Spanyol tetap terbatas pada kolompok elite. Hal itu bisa diketahui dari fakta bahwa pada akhir masa penjajahan Spanyol tidak lebih dari sekitar tiga persen dari seluruh penduduk Filipina berbahasa Spanyol (Sibayan dan Gonzalez 1996: 139). Walaupun pada periode 1898–1948 bahasa Spanyol hanya diajarkan pada pendidikan menengah sebagai mata pelajaran, pada sensus penduduk 1948, lima puluh tahun berikutnya, masih ada dua persen dari seluruh penduduk dapat berbicara bahasa Spanyol. Suatu persentase yang juga tidak berkurang pada 1960. Bahasa Spanyol sampai tahun 1987 tetap merupakan satu dari tiga bahasa resmi Filipina, di samping bahasa Inggris dan bahasa Filipino, yang didasarkan pada bahasa Tagalog, sebagai bahasa nasional. Bahasa Spanyol tetap ditawarkan sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah menengah dan pada pendidikan tinggi menjadi bahasa wajib pada beberapa jurusan, misalnya pada studi hukum (Sibayan 1974: 229–30, 240; Sibayan dan Gonzalez 1996: 140). Sampai sekarang—seratus tahun setelah masa Spanyol—pada kelas elite masih bisa didengar pemakaian bahasa Spanyol di Manila.

### BAHASA INGGRIS DI FILIPINA

Setelah Amerika mengambil alih pemerintahan di Filipina pada 1900, dengan segera bahasa Inggris dipilih menjadi bahasa pendidikan umum. Oleh karena hanya sedikit penduduk yang mengenal bahasa Spanyol dan dari bahasa pribumi yang banyak itu tidak satu pun memiliki nilai kesusastraan, bahasa Inggris dianggap pilihan yang paling praktis. Dari segi politik, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan merupakan langkah penting menuju kesatuan nasional dan menjadi syarat bagi pemerintahan yang demokratis. Dari segi budaya, bahasa Inggris bahkan memberi jalan ke arah peradaban Barat dan menuju pemikiran demokratis.

Pemilihan bahasa Inggris jelas muncul dari imperialisme budaya

Amerika Serikat, tetapi juga muncul dari efisiensi untuk mewujudkan imperialisme itu melalui pendidikan. Pendidikan berbahasa Inggris menjadi titik pusat dalam kebijakan untuk memerangi penindasan sosial dan untuk meresosialisasikan orang Filipina ke model Amerika (Neys 1945: 128; Foley 1978: 74–7). Dengan demikian pendidikan berbahasa Inggris dengan sangat cepat dan efisien dilaksanakan, dengan hasil pada sensus penduduk tahun 1939, hampir 27% dari penduduk mengenal bahasa Inggris (bandingkan dengan 24% yang mengenal Filipino dan 2.6% bahasa Spanyol) – suatu persentase yang pada tahun 1948 bertambah besar menjadi 37% (bandingkan dengan 37% bahasa Filipino dan 2% bahasa Spanyol) dan pada sensus 1960 hampir 40% (Filipino 40% dan bahasa Spanyol 2%) (Sibayan 1974: 240), dan lebih dari 50% pada tahun 1995 (Crystal 1997: 59).

Yang mencolok dalam politik bahasa Amerika adalah penolakan mutlak terhadap bahasa-bahasa pribumi. Sementara penguasa Eropa di Asia sejak lama mempelajari bahasa-bahasa pribumi, mengkodifikasikan, membakukan dan menggunakan sebagai bahasa di bidang pendidikan, orang Amerika menyisihkan bahasa-bahasa pribumi Filipina. Jumlah bahasa pribumi dianggap terlalu banyak dan akan menyebabkan sistem pendidikan yang tidak gamblang dan mahal, dan karena itu akan membahayakan demokratisasi, tetapi yang terutama adalah ketakutan orang Amerika terhadap pendidikan yang tidak berkualitas, sebagai dampak penggunaan bahasa pengantar non-Barat. Sampai tahun 1938 tidak satu bahasa pribumi pun yang boleh dipergunakan di sekolah, bahkan juga tidak di halaman sekolah, karena hal itu akan menghalangi pemelajaran bahasa Inggris (Sibayan 1974: 226). Sementara itu pihak pribumi semakin mendesak pendidikan juga diberikan dalam bahasa daerah. Karena pengaruh aliran nasionalis terutama pada tahun tiga puluhan, bahasa Tagalog – bahasa ibu dari 20% dari jumlah penduduk – semakin kuat, hingga akhirnya pada 1939 diterima sebagai bahasa pengantar di samping bahasa Inggris (Neys 1945: 135). Bahasa Spanyol tidak lagi diperhitungkan sebagai bahasa pendidikan, karena bahasa itu bahasa musuh, tetapi terutama juga karena akan memberikan hak istimewa kepada sekelompok kecil orang untuk mempertahankan monopoli budayanya. Namun, sebagai bahasa kaum elite dan untuk kehidupan budaya dan yuridis, bahasa Spanyol masih memiliki pengaruh yang penting untuk waktu yang lama.

Terutama setelah kemerdekaan (1946) bahasa Inggris di Filipina mengalami penyesuaian dengan situasi, karena pengaruh bahasa-bahasa pribumi, seperti juga yang terjadi di bekas koloni-koloni Inggris (Kachru 1986, 1992; Phillipson 1992; Crystal 1997). Bentuk bahasa ini dikenal sebagai Inggris-Filipina. Meskipun bahasa Filipino sekarang ini dominan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa Inggris(-Filipina) masih tetap dominan sebagai bahasa resmi kedua, sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa

media massa dan komunikasi internasional. Jumlah tahunan publikasi dalam bahasa Inggris jauh lebih tinggi daripada dalam bahasa Filipino (Sibayan dan Gonzalez 1996: 143–57).

### BAHASA INGGRIS DI HINDIA INGGRIS

Sementara bahasa Inggris tetap berperan penting sebagai bahasa kedua di Filipina, di India bahasa Inggris sampai sekarang memperoleh status bahasa resmi, bersama dengan 15 bahasa lainnya, tetapi bahasa nasional India adalah bahasa Hindia.

Politik bahasa kolonial untuk Hindia Inggris ditetapkan dengan jelas pada 1830. Pada masa *East India Company* belum ada usaha untuk melaksanakan pendidikan Barat di Hindia Inggris. Baru pada akhir abad ke-18, mengingat kebutuhan akan pegawai pribumi, diselenggarakan sedikit pendidikan berbahasa Inggris. Selanjutnya pada kurun 1830-an ada diskusi panjang lebar mengenai seberapa jauh suatu sistem pendidikan Barat harus dilaksanakan dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Yang menentang pendidikan berbahasa Inggris dengan tegas adalah kaum 'orientalis', yang berpihak pada pendidikan dalam bahasa-bahasa pribumi dengan bahasa-bahasa klasik Sanskerta dan Arab sebagai mata pelajaran. Kaum 'anglisis' sebaliknya melihat hal itu sebagai pemborosan uang dan waktu, sedangkan bahasa-bahasa pribumi disisihkan karena dianggap terlalu miskin dan kurang berkembang serta tidak memiliki nilai sastra. Pembelaan dari Thomas Babington Macaulay pada 1835 sangat mengesankan. Ia yakin superioritas Eropa di atas bahasa-bahasa klasik India dan menyatakan, "a single shelf of good European Library was worth the whole native literature of India and Arabia" (Basu 1978: 55). Pada tahun yang sama diputuskan untuk melaksanakan pendidikan berbahasa Inggris dengan penekanan pada kesusastraan dan ilmu pengetahuan Eropa. Dengan asimilasi pemikiran Eropa akan dapat dilaksanakan suatu regenerasi moral dan sosial di India. Lagi pula pendidikan berbahasa Inggris dapat menciptakan ikatan yang erat antara penguasa dan penduduk, dan selanjutnya dapat menjamin stabilitas pemerintahan Inggris. Apalagi secara perlahan-lahan akan muncul pasar berpotensi besar bagi barang-barang impor Inggris (Basu 1978: 57–8; Kachru 1983: 19–24).

Politik bahasa dan budaya yang probahasa Inggris yang dilaksanakan sejak tahun 1835 sampai dengan kemerdekaan pada 1947 sesungguhnya tidak lagi diubah. Diputuskan untuk terutama berkonsentrasi pada pendidikan bagi kelas sosial tinggi. Di bidang pemerintahan, ekonomi, dan budaya dianggap penting untuk menciptakan elite orang India yang dididik dalam bahasa Inggris, yang selanjutnya akan dapat berperan menjadi penghubung dengan jutaan massa, dalam kata-kata Macaulay: "interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour but

English in taste, in opinions, in morals and in intellect" (Basu 1978: 59). Dengan demikian sejak 1835 pendidikan terutama terarah kepada kelas sosial atas yang terurbanisasi, sedangkan pendidikan rakyat hampir-hampir tidak mendapat perhatian. Pendidikan dengan bahasa pengantar Hindi dan Bengali baru muncul pada awal abad ke-20, dan itu di luar wewenang pemerintah. Sampai 1937, pada dasarnya, semua pendidikan menengah dan tinggi seluruhnya dalam bahasa Inggris. Bahasa itu tetap menjadi syarat mobilitas sosial dalam masyarakat India. Sementara itu dari pihak Inggris keputusan tahun 1835 sering disesali, ketika menjadi semakin jelas bahwa pendidikan yang berorientasi Barat itu membawa sekelompok orang India yang sadar politik dengan aspirasi-aspirasi nasionalistik (Basu 1978: 65). Juga dari pihak pribumi sendiri pun politik bahasa itu disesali. Gandhi pada 1920-an menyatakan bahwa telah diciptakan suatu kelompok elite, yang benar-benar lepas dari budaya pribumi dan yang tidak lagi dapat menggunakan bahasa-bahasa pribuminya. Ia berpendapat bahwa India hanya dapat merdeka apabila orang lepas dari penindasan bahasa Inggris (Basu 1978: 65).

Namun, yang terakhir itu sama sekali tidak terjadi. Sejak 1920-an, disebabkan oleh pendidikan dan juga pengaruh pers berbahasa Inggris, kedwibahasaan justru bertambah besar, terutama pada kelas menengah. Selain itu muncul suatu bentuk bahasa Inggris tertentu yang disesuaikan. Pada tahun 1945 bahasa Inggris India ini dipakai oleh kurang lebih tujuh juta orang (dua persen dari penduduk), dan bagi setengah juta orang telah menjadi bahasa ibu (De Josselin de Jong 1976: 14). Meskipun pada masa kolonial bahasa Inggris India itu dipandang rendah, perlahaan namun pasti dari bentuk itu muncul bahasa Inggris Asia Selatan yang baku, yang sekarang ini dipergunakan di Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Bahasa Inggris Asia Selatan itu tentu saja mengenal berbagai subvarian regional tergantung dari bahasa daerah yang dipakai, tetapi juga subvarian budaya yang terikat pada kelas sosial dan kelompok etnik. Bahasa itu terutama digunakan oleh para dwibahasa yang bekerja pada pemerintah atau di bidang pendidikan (Kachru 1983: 22–6).

Sebagai warisan kolonial bahasa Inggris masih berperan penting di Asia Selatan. Bahasa itu digunakan oleh lebih dari 60 juta orang dalam bentuk Asia Selatannya. Kelompok itu adalah kelompok penutur bahasa Inggris yang terbesar di dunia setelah Inggris Raya dan Amerika Serikat. Kelompok berbahasa Inggris di India itu hanya membentuk satu fraksi dari seluruh penduduk (37 juta dari penduduk yang berjumlah 936 juta, yaitu 4%), tetapi ini menyangkut kelompok penduduk yang penting artinya dari segi ekonomi, politik, dan sosial (Crystal 1997: 57–60). Sesudah kemerdekaan pada 1948 bahasa Hindi dipilih sebagai bahasa nasional, tetapi kepada 15 bahasa lainnya diberikan status bahasa resmi, termasuk di dalamnya bahasa Inggris dan bahasa Sanskerta. Di tengah semua bahasa itu, bahasa Inggris tetap menjadi

bahasa dominan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjadi bahasa pengantar pada pendidikan tinggi dan dari masyarakat elite (Dua 1993: 302).

Bahasa Inggris menjadi *lingua franca* untuk komunikasi nasional dan internasional. Tambahan pula bahasa Inggris India itu berperan penting dalam media massa, terutama media cetak. Di India lebih banyak muncul terbitan yang berbahasa Inggris Asia Selatan daripada yang berbahasa pribumi lainnya. Apalagi bahasa Inggris Asia Selatan itu telah mengenal tradisi sastra yang kaya (Verma 1994; Walsh 1990). Dalam pendidikan sekarang digunakan dan dipelajari tiga bahasa yaitu bahasa daerah, bahasa Hindi sebagai bahasa nasional, dan bahasa Inggris sebagai *lingua franca* terpenting (Kachru 1983: 53–6; Crystal 1997: 43). Dalam persaingan antara bahasa Hindia dan bahasa Inggris kelihatannya bahasa Inggris lambat-laun akan menang, berkat pemakaianya yang bertambah besar pada pendidikan dan dalam lingkungan elite masyarakat (Dua 1993, 1996).

#### BAHASA PRANCIS DI INDO CINA

Lebih kuat daripada para kolonialis Barat lainnya, Prancis ingin memaksakan bahasa dan budaya Prancis di semua koloninya, dengan keyakinan bahwa pendidikan bahasa Prancis memenuhi suatu *mission civilisatrice* (misi peradaban) dan bersamaan dengan itu posisi Prancis di dunia dapat diperkuat (Gordon 1977: 7). Namun, misi ini pada permulaannya lebih merupakan ucapan daripada praktik. Pandangan bahwa di semua koloninya orang Prancis bertindak sebagai misionaris bahasa dan budaya sendiri, hanya sebagian saja benar.

Di koloni-koloni Prancis di Afrika pada periode 1890–1945 hanya diberikan pendidikan berbahasa Prancis kepada sekelompok kecil elite dengan tujuan asimilasi dan pendidikan pegawai pemerintah pribumi untuk fungsi-fungsi rendah. Baru setelah Perang Dunia II, sebagai dampak tekanan nasionalistis, Prancis terpaksa memberikan semakin banyak pendidikan berbahasa Prancis dengan standar Prancis kepada orang pribumi Afrika (Gordon 1977: 9, 56). Politik bahasa pascaperang itu selanjutnya menghasilkan penyebaran bahasa Prancis yang meluas di dunia, tidak hanya di Afrika tetapi juga di Karibia (Amerika Tengah). Pada hampir semua bekas koloni Prancis, bahasa Prancis dipilih menjadi bahasa nasional. Pilihan itu sering kali merupakan jalan keluar yang praktis di antara jumlah bahasa pribumi yang sangat besar, yang banyak di antaranya belum terkodifikasi.

Politik bahasa pascaperang yang aktif guna menyebarkan bahasa Prancis ini sebenarnya sudah terlambat untuk dapat memainkan peran yang lama untuk Indo Cina. Seperti juga di koloni-koloni lain, sejak awalnya politik bahasa Prancis di koloni-koloni di Asia juga ditujukan untuk asimilasi, dengan

harapan seluruh penduduk belajar bahasa Prancis dan bahasa Prancis sepenuhnya menggantikan bahasa-bahasa pribumi (Defrancis 1977: 91–2). Segera setelah menguasai Kochin Cina (Vietnam Selatan) pada 1860-an dan selanjutnya pada 1880-an wilayah Annam dan Tonkin (Vietnam Utara) – pada tahun 1886 wilayah-wilayah itu disatukan dengan Kamboja dan Laos, menjadi Indo Cina Prancis – politik bahasa pertama-tama ditujukan untuk mengurangi peran bahasa Cina. Bahasa budaya yang berkuasa di seluruh Indo Cina ini membentuk suatu penghalang antara Prancis dan penduduk pribumi. Pendidikan berbahasa Prancis harus dapat menjembata-ninya dengan meneruskan kebudayaan Eropa kepada penduduk pribumi dan mengisolasi Indo Cina dari penguasa sebelumnya, yang sekarang menjadi negara tetangga, yaitu Cina (Defrancis 1977: 77–8). Dengan tujuan inilah bahasa Vietnam ideografis, bahasa Nom, ditolak dan bahasa Vietnam dengan aksara Latin, bahasa Quoc Ngu, didorong dan lambat-laun dipergunakan untuk berbagai tujuan resmi di samping bahasa Prancis (Defrancis 1977: 110–1).

Tujuan utama politik bahasa Prancis, seperti di koloni-koloni lainnya, adalah untuk menjadikan bahasa Prancis bahasa dominan di seluruh Indo Cina. Hal ini tidak hanya diharapkan dari sudut pandang imperialisme budaya, tetapi juga dari politik pemerintahan karena pemerintah Kochin Cina, Annam, Tonkin, Kamboja, dan Laos akan lebih baik dikoordinasi. Pada 1887 diputuskan untuk menyebarluaskan bahasa Prancis di mana saja di Indo Cina dengan tujuan secara lambat-laun mewujudkan cita-cita *France asiatique ‘Asia Prancis’* (Defrancis 1977: 131–4).

Mula-mula pendidikan berbahasa Prancis terutama dimaksudkan bagi anak-anak dari keluarga Prancis dan untuk sekelompok kecil anak Vietnam dari kaum elite. Baru setelah 1900 jumlah anak Vietnam dari keluarga pegawai pemerintah dan orang terkemuka lebih besar dari jumlah anak Prancis (Kelly 1978: 99). Oleh karena itu pengetahuan bahasa Prancis melonjak tajam dan pada sekitar tahun 1910 muncul suatu kelas menengah yang berorientasi Barat dengan pendidikan berbahasa Prancis, yang terdiri dari para juru tulis, perawat, akuntan, penyuluh pertanian, pengajar, dan sebagainya (Defrancis 1977: 174–5).

Kecuali pada bahasa Prancis, politik bahasa di Vietnam juga terarah pada penyebarluasan bahasa Quoc Ngu. Sebenarnya alfabetisasi bahasa Vietnam dengan aksara Latin melicinkan jalan menuju pendidikan berbahasa Prancis. Oleh karena itu pada tahun 1905–1918 bahasa Quoc Ngu ini dibakukan untuk menjembatani seluruh variasi regional, dan pada 1924 diputuskan untuk menjadikannya bahasa pengantar dalam pendidikan dasar tiga tahun. Dalam pendidikan dasar itu bahasa Prancis merupakan mata pelajaran yang penting, tetapi sebagai bahasa pengantar hanya dipakai pada pendidikan lanjutan, menengah, dan tinggi. Bahasa Quoc Ngu oleh karenanya menyebar dengan luas. Namun, bahasa ini tetap saja berada di bawah posisi dan status

yang sementara itu telah dicapai bahasa Prancis. Terutama di Saigon, sejak awal abad ke-20 bahasa Prancis mengalami penyebaran yang sangat besar. Bahasa ini memperoleh impuls ekstra dari politik pendidikan baru dari tahun 1920-an. Oleh karena itu muncul suatu elite Vietnam yang cukup besar yang menggunakan bahasa Prancis. Untuk sebagian orang bahasa Prancis bahkan menjadi bahasa pergaulan sehari-hari (Defrancis 1977: 201–2). Meskipun pada 1940 hanya sepuluh persen dari kaum muda bersekolah, dan hanya sepuluh persen daripadanya meneruskan pendidikan lanjutan dengan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar, bahasa Prancis menjadi bahasa kaum elite. Bahasa Prancis merupakan bahasa dominan pemerintah dan hukum, pers, ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi internasional. Namun, bahasa Vietnam tetap menjadi bahasa komunikasi sehari-hari, bahasa dari jutaan orang di luar wilayah perkotaan. Bahasa Vietnam yang menjadi bahasa pengantar pada pendidikan dasar, menjadi bagian dari pers dan menjadi bahasa pergerakan nasional yang bangkit.

Meskipun pada tahun 1924 dipilih untuk mempromosikan baik bahasa Vietnam Quoc Ngu maupun bahasa Prancis, bukan maksudnya untuk menjadikan bahasa Quoc Ngu bahasa pertama di Vietnam atau untuk menciptakan negara dwibahasa. Tujuannya adalah tetap untuk menciptakan Vietnam yang berbahasa Prancis, sebagai hasil dari *mission civilisatrice* (Defrancis 1977: 229). Bahasa Quoc Ngu hanyalah dimaksudkan sebagai alat dalam fase peralihan. Bawa tujuan tersebut tidak tercapai, itu disebabkan oleh perlawanan dari penduduk, didukung oleh warisan budaya yang relatif homogen dari suatu tradisi yang berabad-abad dan bernilai tinggi. Warisan itu memungkinkan mereka melawan pemaksaan bahasa dan budaya Prancis dengan lebih baik, dibandingkan dengan kelompok penduduk yang buta huruf dan yang terbagi-bagi dari segi bahasa di Afrika dan Karibia (Defrancis 1977: 229–30).

Setelah kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam pada 1945, bahasa Quoc Ngu langsung dipilih sebagai bahasa pengantar pendidikan umum. Namun untuk waktu yang lama setelah itu bahasa Prancis tetap berfungsi sebagai bahasa kedua, yaitu di Vietnam, Laos, dan Kamboja. Pada 1960-an sekitar 12 persen penduduk baik dari Vietnam Selatan maupun Vietnam Utara masih mengenal bahasa Prancis, meskipun bahasa itu sebagai bahasa pengantar pendidikan telah dihapuskan dan hanya diajarkan sebagai mata pelajaran. Di Laos dan Kamboja bahasa Prancis sampai 1970-an masih dipakai sebagai bahasa pengantar pada pendidikan menengah dan tinggi (Gordon 1977: 83). Meskipun pada 1975 kehadiran Barat telah berakhir di Vietnam, Kamboja, dan Laos, bahasa kolonial sesudah itu masih tetap berperan—memang semakin berkurang—dalam kehidupan kaum elite yang dulu dididik dalam bahasa Prancis.

### LIMA BAHASA KOLONIAL EROPA DI ASIA

Yang hendak dicapai oleh negara-negara Barat di seluruh koloni Asia adalah assimilasi satu kelompok elite, sementara sebagian besar penduduk dibiarkan saja. Namun, tujuan jangka panjang Spanyol adalah koloni yang berbahasa Spanyol, seperti juga setelah itu, Amerika menginginkan penduduk Filipina berbahasa Inggris. Tujuan Prancis adalah Indo Cina yang berbahasa Prancis dan tujuan Inggris adalah penduduk India berbahasa Inggris. Hanya Belanda yang memutuskan pada pertengahan abad ke-19 untuk tidak menggunakan bahasa Belanda secara umum; suatu politik bahasa yang tidak pernah diubah lagi sampai dengan kemerdekaan Indonesia. Politik bahasa Spanyol, Amerika, dan Prancis terutama ditentukan dari tanah air, sedangkan politik bahasa Inggris dan Belanda untuk sebagian besar dirumuskan di negara jajahan.

Hasil dari politik bahasa kolonial di semua negara jajahan adalah munculnya suatu kelompok elite yang dididik dalam bahasa Eropa. Akibat dari politik bahasa yang membatasi kelompok elite di Hindia Belanda adalah bahwa jumlah yang berbahasa Belanda pada 1940 akhirnya hanya mencapai dua persen. Di Filipina, sebaliknya, pada 1960-an dua persen dari penduduk masih mengenal bahasa Spanyol—lebih dari 60 tahun setelah masa Spanyol—and 40 persen bahasa Inggris, persentase yang sejak itu naik hingga lebih dari 50 persen pada 1995 (Crystal 1997: 59). Di Vietnam, masih pada tahun enam puluhan, 12 persen dari penduduk mengenal bahasa Prancis, sementara jumlah orang yang berbahasa Inggris di negara-negara bekas koloni Inggris di Asia Selatan sejak kemerdekaan makin bertambah dan pada 1995 lebih dari 60 juta orang berbahasa Inggris Asia Selatan. Lagi pula sekarang ini sekurangnya sepertiga dari seluruh penduduk yang berjumlah 23 juta di Malaysia dan Singapura berbahasa Inggris (Crystal 1997: 57–60). Tentu saja hasil itu banyak ditentukan oleh politik bahasa yang dilaksanakan dan oleh penyebaran bahasa dan budaya secara aktif, tetapi pastilah juga merupakan dampak dari perhatian yang diberikan kepada pendidikan secara lebih umum. Dibandingkan dengan Hindia Belanda, di Hindia Inggris, Filipina, dan di Indo Cina Prancis kebijakan finansial diberikan dua sampai tiga kali lebih besar kepada pendidikan pribumi (Nieuwenhuis 1923: 202; Kelly 1978: 102, 119–20). Hasilnya menurut UNESCO (1947: 23–6) sekitar tahun 1940 di Hindia Inggris ada 88% penyandang buta huruf, di Filipina 40%, di Vietnam 80%, dan di Hindia Belanda bahkan 95% penduduk niraksara.

Belanda paling sedikit melakukan penyebaran bahasanya sendiri dan selalu mengambil jarak terhadap *mission civilisatrice* dari negara-negara Barat lain di Asia. Sebaliknya, Belanda memang memberikan relatif paling banyak perhatian bagi kodifikasi, pembakuan, dan pembaruan bahasa-bahasa pribumi. Pada pendidikan rakyat tiga tahun, sejak pertengahan abad kesembilan belas disusun bahan ajar dalam bahasa-bahasa Pribumi terpenting. Pada akhir masa kolonial pendidikan dasar diberikan dalam 30 bahasa

pribumi yang berbeda-beda. Juga di Hindia Inggris sejak awal abad ke-19 dicurahkan perhatian kepada bahasa-bahasa pribumi dan bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada pendidikan dasar. Di Filipina Amerika, hal itu sama sekali tidak terjadi dan bahasa Inggris dipilih menjadi bahasa pendidikan. Akhirnya, di Vietnam orang memilih membakukan bahasa Vietnam dengan aksara Latin untuk selanjutnya menggunakannya sebagai bahasa pengantar pada pendidikan dasar. Untuk pendidikan lanjutan di semua negara tersebut disetujui bahasa kolonial, juga di Hindia Belanda. Namun di Hindia Belanda tidak pernah dimaksudkan pada akhirnya untuk menggantikan bahasa-bahasa pribumi dengan bahasa kolonial, sesuatu yang ditujukan oleh Prancis di Indo Cina dan oleh Spanyol di Filipina, suatu kebijakan yang selanjutnya diteruskan oleh Amerika dengan bahasa Inggris. Secara positif, dibandingkan dengan negara-negara lain, Belanda tidak pernah melaksanakan politik bahasa yang ditujukan pada hal yang bisa disebut '*genosida linguistik*' (Haugen 1973: 55). Namun, dilihat dari perspektif imperialisme bahasa dan budaya, Belanda gagal karena menghambat penduduk pribumi belajar bahasa Belanda. Oleh karena semua pendidikan lanjutan diberikan dalam bahasa kolonial, diciptakan suatu kelompok penduduk yang kebarat-baratan dan terisolasi dari budaya sendiri. Politik bahasa Belanda di Hindia Belanda juga diarahkan kepada keutuhan keanekaragaman bahasa, dan pelestarian bahasa Belanda pada sekelompok kecil masyarakat elite, maka politik ini dapat digambarkan sebagai politik *divide et impera*, diarahkan kepada perlindungan terhadap keberadaan kolonial.

Suatu politik bahasa kolonial yang tertuju pada 'kebhinneka-tunggal-ikaan' sebenarnya harus diarahkan pada dua jalur sekaligus. Politik bahasa semacam itu, di satu pihak harus berusaha untuk mengasimilasikan seluruh penduduk dengan bahasa dan budaya kolonial, dan di lain pihak menjaga agar budaya dan keanekaragaman bahasa dari berbagai suku bangsa diterima dan dipelihara. Kebijakan semacam itu ditujukan pada kedwibahasaan, tanpa merugikan bahasa-bahasa pribumi. Namun, politik bahasa seperti itu tidak pernah dilaksanakan di Asia oleh para kolonialis Eropa. Misalnya di Uni Soviet dulu, puluhan bahasa lokal dihormati dan dibakukan dengan tujuan pemakaian bahasa-bahasa tersebut di wilayah tertentu, sementara dalam bidang pendidikan bahasa Rusia diberikan sebagai mata pelajaran penting yang bertujuan untuk komunikasi antaretnik dan komunikasi nasional. Maksud dari politik bahasa itu tidak untuk menggantikan bahasa-bahasa lokal, tetapi justru melindunginya dan selanjutnya mengembangkannya, dan sekaligus mendorong kedwibahasaan (Comrie 1981: 21–37; lihat juga Kreindler 1993). Politik bahasa Soviet ini selanjutnya memberi inspirasi bagi Meksiko untuk melaksanakan politik bahasa dan pendidikan yang terarah pada kedwibahasaan. Kemudian politik ini pada tahun lima puluhan, berkat

Meksiko, menjadi dasar dari berbagai proyek pengembangan yang dibiayai oleh UNESCO untuk negara-negara Dunia Ketiga (Heath 1972: 110, 140). Politik yang terarah pada penciptaan 'kebhinneka-tunggal-ikaan' semacam itu di Hindia Belanda sesungguhnya tidak pernah dilaksanakan. Demikian pula dengan politik bahasa yang lebih banyak bernada imperialistis, yaitu politik bahasa Prancis di Indo Cina, Inggris di Hindia Inggris, Spanyol dan kemudian Amerika di Filipina.

Justru karena Belanda dengan sadar tidak melaksanakan imperialisme bahasa, serta adanya norma bahasa yang ketat yang dipergunakan dalam pendidikan berbahasa Belanda, tidak pernah muncul suatu bentuk bahasa Belanda-Indo yang umum dipakai. Sesungguhnya di bekas koloni-koloni dengan politik imperialistis budaya yang jelas, justru norma-norma standar dari tanah air, tidak dipegang dengan ketat. Demikianlah pada abad ke-19, bahasa Spanyol Meksiko menjadi bahasa nasional Meksiko, dan di Filipina dapat didengar sejenis Spanyol Filipina. Pada abad ke-20 muncul bahasa Inggris-Asia Selatan, dan suatu bentuk bahasa Inggris Filipina. Orang Prancis sebenarnya tidak menerima keberadaan bahasa Prancis "yang menyimpang" dan dipengaruhi oleh bahasa-bahasa pribumi, seperti juga orang Belanda di koloninya tidak menerima suatu bahasa Belanda yang "menyimpang", dan melakukan apa saja untuk mempertahankan norma bahasa standar. Baru setelah kemerdekaan, pada sejumlah bekas koloni Prancis diterima bentuk-bentuk bahasa Prancis nonstandar meskipun varian-varian itu hampir-hampir tidak dapat dipahami di Prancis sendiri. Juga di Suriname telah berkembang sebuah bentuk bahasa Belanda Suriname yang setelah masa kemerdekaan (1975) memperoleh semakin banyak hak keberadaannya.

### EVALUASI

Tak satu pun bekas koloni Barat di Asia, setelah kemerdekaan, memilih bahasa dari para kolonialis mereka sebagai bahasa nasional, sedangkan kebanyakan bekas koloni di Afrika dan Amerika mengambil alih bahasa kolonial sebagai bahasa nasional (lihat Wardhaugh 1987). Di sana, di tengah banyaknya bahasa pribumi, setelah kemerdekaan, bahasa kolonial hampir-hampir selalu menduduki posisi dominan, demikian menurut Heath (1972: 190) yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

The new *developing* nations, faced with nationhood after a long colonial history, inherited the language and cultural standards associated with the Christian faith of the metropolitan country; the indigenous peoples offered no major language linked with a great religion which had dictated the economic, cultural, and political lives of its adherents.

Tambahan pula pemilihan bahasa kolonial sebagai bahasa nasional diilhami oleh keterikatan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi politik

(Heath 1972: 190). Untuk alasan terakhir itu bahasa Inggris di Asia sekarang masih penting peranannya, terutama di India dalam persaingan dengan bahasa Hindia sebagai bahasa nasional (Dua 1993); dan di Filipina bahasa Inggris bersaing dengan bahasa Filipino sebagai bahasa nasional (Sibayan dan Gonzalez 1996). Bahwa di Asia bahasa kolonial Eropa tidak dipilih sebagai bahasa nasional, sebenarnya karena budaya-budaya pribumi yang ditemukan di Asia telah sangat berkembang. Hal itu berhubungan dengan kuatnya agama, dan tradisi kebudayaan dan kesusastraan yang berabad-abad usianya. Semua itu menghalangi pelaksanaan politik bahasa dan budaya kolonial.

Pada sebagian besar koloni Amerika terjadi perpindahan rakyat dari berbagai tanah asal, perpindahan rakyat sebagai dampak dari perbudakan, dan dari pemusnahan budaya pribumi dan bahkan pembinasaan rakyat. Jumlah Kreol di negara-negara itu dibandingkan dengan Asia relatif besar, dan jumlah penduduk relatif kecil, dan itu sangat membantu pilihan untuk menjadikan bahasa kolonial sebagai bahasa nasional.

Yang terakhir juga menjelaskan pemilihan bahasa Belanda di Hindia Barat. Sampai sekarang bahasa Belanda menjadi bahasa resmi pemerintah dan pendidikan di Suriname dan Antillen Belanda. Di wilayah-wilayah itu sejak awal dilaksanakan politik asimilasi yang menyebabkan bahasa-bahasa pribumi secara sistematis ditindas demi keuntungan bahasa Belanda. Dibandingkan dengan bahasa Belanda di Indonesia, di Hindia Barat dilaksanakan politik bahasa yang sama sekali berbeda. Sejumlah faktor bertanggung jawab atas hal ini. Yang pertama adalah keinginan untuk mengkristenkan sepenuhnya penduduk Suriname dan Antillen Belanda, dan hal tersebut paling baik dilakukan dalam bahasa Belanda. Bahasa Sranan, semacam *lingua franca* yang didasarkan pada bahasa Inggris, yang digunakan di Suriname dianggap tidak tepat, seperti juga bahasa Papiamento yang didasarkan pada bahasa Portugis di Antillen Belanda. Di Indonesia juga dicoba untuk menyebarkan agama Kristen dalam bahasa Belanda, tetapi hal itu hanya terjadi di beberapa daerah yang ditunjuk. Politik resmi "tidak campur tangan" di daerah yang telah diislamkan dalam hal ini menghalangi penyebaran bahasa Belanda. Yang kedua, di Hindia Barat seluruh penduduk pribumi, yang sebagian besar daripadanya khusus diimpor, bekerja di perkebunan-perkebunan yang dikontrol oleh Belanda. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk pemerintahan langsung di sana. Di Indonesia kegiatan ekonomi sebagian besar berada di luar pengaruh kekuasaan kolonial. Jumlah penduduk yang sangat besar dengan bahasa dan budaya yang berabad-abad usianya, menyebabkan dipilihnya bentuk pemerintahan yang tidak langsung, dan oleh karena itu pemakaian bahasa Belanda untuk pergaulan langsung dengan rakyat sebenarnya sia-sia belaka. Sesungguhnya yang paling penting adalah masalah jumlah penduduk. Untuk negara sekecil Belanda mungkin saja membayangkan sebuah wilayah Belanda tropis di

Hindia Barat yang berpenduduk hanya beberapa ratus ribu jiwa, tetapi itu tidak terjadi di Indonesia yang berpenduduk jutaan, dan oleh karena itu politik yang terarah pada asimilasi bukan saja tidak nyata, tetapi juga tidak diinginkan.

Pembaratan umum penduduk Hindia Belanda dengan memberikan pendidikan berbahasa Belanda sebenarnya secara bertahap akan membahayakan keberadaan koloni. Tidak dianggap bijaksana untuk mengubah Indonesia menjadi semacam wilayah budaya Belanda, seperti misalnya Prancis ingin menjadikan koloni-koloninya semacam Prancis Seberang Laut. Sebaliknya di Hindia Belanda justru dipilih menciptakan pluralitas budaya:

Pemelajaran yang penuh perhatian dan penggambaran bahasa dan budaya rakyat yang banyak jumlahnya, dan inkorporasi pengetahuan antropologi dan linguistik itu dalam pendidikan indologi telah memperkuat pluralitas budaya Nusantara, yang dengan demikian ditanamkan dalam ideologi kolonial (Van Doorn 1995: 119).

Pluralitas budaya dan bahasa pribumi harus tetap dijaga. Tepat bila dikatakan bahwa kebijakan pemerintah Belanda selalu memberi lebih banyak penekanan pada pluralitas bahasa dan budaya di Hindia Belanda, lebih dari negara-negara kolonial lainnya (Van Doorn 1995: 126).

Politik bahasa di Hindia Belanda sesungguhnya tidak pernah memperlihatkan imperialisme bahasa. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pendapat yang sekarang masih sering menguasai pikiran orang Belanda, yaitu bahwa politik bahasa dan propaganda bahasa Belanda merupakan instrumen yang kurang sah, dengan kecenderungan nasionalistis. Para kolonialis Barat lainnya seperti Spanyol, Portugal, Inggris, dan terutama Prancis sudah sejak awal sadar bahwa suatu politik bahasa dan budaya – baik di tanah air maupun di koloni – akan memperkuat rasa nasionalisme. Namun, di Belanda tidak muncul kesadaran bahwa bahasa dapat menjadi alat kekuasaan. Struktur federal dari Republik Belanda Serikat pada abad ke-17 tidak memungkinkan tumbuhnya suatu politik nasionalistis bertalian dengan bahasa Belanda. Di negara-negara Eropa lainnya sejak awal abad ke-19 gagasan romantik dan konsep kenegaraan yang juga didefinisikan berdasarkan bahasa nasional (Stephens 1978: xxi). Namun, hal itu justru tidak muncul di Belanda sebagai dampak dari pemberontakan Belgia pada 1830-an. Belanda sebagai negara tidak dapat lagi dengan baik bersatu dengan bahasa Belanda sebagai ekspresi kesatuan bangsa, untuk alasan yang sederhana bahwa daerahnya tidak sama lagi dengan wilayah bahasa. Hal ini membuat Belanda unik di Eropa, sebab bahasa ibu tidak bisa diikatkan lagi dengan kebangsaan Belanda (Gelderblom 1996). Ini memberikan penjelasan untuk kenyataan bahwa bahasa Belanda hampir-hampir tidak menjadi bagian dari kesadaran nasional Belanda, bahwa orang Belanda sering kurang setia pada bahasanya sendiri, dan tidak ada rasa keterikatan kepada bahasa sendiri pada

banyak orang Belanda (Uhlenbeck 1993: 30; De Vries 1993: 5–6).

### PENUTUP

Masalah-masalah politik bahasa di seluruh dunia sekarang ini menarik perhatian. Hal ini berlaku tidak hanya untuk permasalahan bahasa-bahasa yang relatif kecil di Eropa yang akan menjadi satu (Groeneboer 1994, 1997). Juga di bekas koloni Belanda berbagai masalah politik bahasa dicari penyelesaiannya. Di Indonesia misalnya, posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekarang tidak diragukan lagi, tetapi hubungan beberapa bahasa penting di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dengan bahasa persatuan ini tetap menuntut perhatian, demikian pula dengan 'perlindungan' Bahasa Indonesia terhadap pengaruh luar, misalnya pengaruh Bahasa Inggris. Suriname mengenal bahasa Belanda sebagai bahasa resmi pendidikan dan pemerintahan, tetapi bahasa-bahasa lainnya juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Di Antillen Belanda, bahasa Belanda masih menjadi bahasa resmi pemerintah dan pendidikan meskipun bahasa Papiamento dan bahasa Inggris semakin penting perannya dalam kehidupan umum. Di semua daerah, permasalahan politik bahasa saat ini berakar dari masa lalu kolonial. Pengetahuan akan politik bahasa masa lalu masih dapat memberikan bantuan kepada diskusi politik bahasa di masa kini. Dalam perwujudan kehidupan berdasarkan 'kebhinneka-tunggal-ikaan' bahkan politik bahasa sangat menentukan.

### DAFTAR ACUAN

- Bakker, J. W. M. (1947), "Maleis als Indonesische eenheidstaal," *Indisch Missie Tijdschrift* 30, h. 57–64.
- Basu, Aparna (1978), "Policy and conflict in India: The Reality and Perception of Education," dalam Ph. G. Altbach dan G. P. Kelly (ed.), *Education and Colonialism*. New York: Longman.
- Bousquet, G. H. (1940), *A French View of the Netherlands Indies*. London/New York: Oxford University Press.
- Cleintuur, G. L. (1990), "Indische identiteit als dynamisch begrip," dalam W. Willems (ed.), *Indische Nederlanders in de ogen van de wetenschap*. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden; h. 52–102.
- Comrie, B. (1981), *The Languages of the Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, D. (1997), *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dalgado, S. R. (1900), *Dialecto Indo-Portugues de Ceylao*. Lisboa: Imprensa Nacional.  
——— (1936), *Portuguese Vocables in Asiatic Languages*. Baroda: Oriental Institute.
- Defrancis, J. (1977), *Colonialism and Language Policy in Viet Nam*. Den Haag: Mouton.
- Doorn, J.A.A. van (1995), *Indische lessen: Nederland en de koloniale ervaring*. Amsterdam: Bakker.
- Dua, H. R. (1993), "'The National Language and the ex-Colonial Language as Rivals: The Case of India,'" *International Political Science Review* 14 (3), h. 293–308.
- (1996), "The Spread of English in India: Politics of Language Conflict and Language

- Power," dalam J. A. Fishman, A. W. Conrad dan A. Rubal-Lopez (ed.), *Post-Imperial English: Status Change in Former British and American Colonies, 1940–1990*. Berlin/New York: Mouton de Gruyter; hlm. 557–88.
- Eersel, Ch. H. (1997), "De Surinaamse taalpolitiek: een historisch overzicht," dalam K. Groeneboer (ed.), *Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba*. Amsterdam: Amsterdam University Press; h. 207–23.
- Foley, D. (1978), "Colonialism and Schooling in the Philippines," dalam Ph. G. Altbach dan G. P. Kelly (ed.), *Education and Colonialism*. New York/London: Longman; h. 69–95.
- Gelderblom, A. J. (1996), "Nederlands taalarmoede is les der historie," *NRC-Handelsblad*, 4 Juni 1996.
- Gobardhan-Rambocus, L. (1997), "Suriname en het Nederlands," dalam K. Groeneboer (ed.), *Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba*. Amsterdam: Amsterdam University Press; h. 225–49.
- Gordon, D.C. (1977), *The French Language and National Identity (1930–1975)*. Den Haag: Mouton.
- Groeneboer, K. (1993), *Weg tot het Westen; Het Nederlands voor Indië 1600–1950; Een taalpolitieke geschiedenis*. Leiden: KITLV Uitgeverij
- (1994), "Het Nederlands als Intereuropese hulptaal?" *Neerlandica Extra Muros* 32–2, h. 24–31.
- (1995), *Jalan ke Barat; Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600–1950: Sejarah Politik Bahasa*. Jakarta: Erasmus Taalcentrum.
- (1997), "De toekomst van het Nederlands," *Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans* 4–2.
- (1998a), *Route to the West; The Dutch Language in Colonial Indonesia 1600–1950: A History of Language Policy*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- (1998b), "Westerse koloniale taalpolitiek in Azië: het Nederlands, Portugees, Spaans, Engels en Frans in vergelijkende perspectief," *Mededelingen van de Afdeling Letterkunde Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen*, Nieuwe Reeks 61–2.
- (1999), "Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda," *Wacana*, Vol. 1 (1), April, h. 32–48.
- Haugen, E. (1973), 'The Curse of Babel,' *Daedalus* 102 (3), h. 47–57.
- Heath, Shirley Brice (1972), *Telling tongues, Language policy in Mexico, Colony to Nation*. New York/London: Teachers College Press, Colombia University.
- Heeroma, K. (1957), "Het Nederlands in Indonesië," *De Nieuwe Taalgids* 50, h. 65–74. [Ceramah 12 Desember 1952; juga dalam K. Heeroma, *Sprekend als nederlandist*. Den Haag: Bakker dan Daamen, 1968; h. 113–29.]
- Huylebrouck, R. (1989), "Por que sera que o Neerlandês, ao contrario do Português, nao se tornou uma lingua universal?" *Linguas e Literaturas; Revista da Faculdade de Letras* II/6, h. 151–69.
- Josselin de Jong, P. E. de (1976), "Afhankelijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid: de taalkundige situatie," *Forum der Letteren* 17, h. 1–22.
- Kachru, B. B. (1983), *The Indianization of English: The English Language in India*. Delhi: Oxford University Press.
- (1986), *The Alchemy of English: The Spread, Functions and Models of Non-native Englishes*. Delhi: Oxford University Press.
- (1992), *The Other Tongue: English Across Cultures*. Urbana/Chicago: University of Illinois Press; cet. II [Cetakan pertama 1982]
- Kelly, G. P. (1978), "Colonial Schools in Vietnam: Policy and Practice," dalam Ph. G. Altbach dan G. P. Kelly (ed.), *Education and Colonialism*. New York/London: Longman, h. 96–121.

- Kelly, G. P. dan Ph. G. Altbach (1978), "Introduction," dalam Ph. G. Altbach dan G. P. Kelly (ed.), *Education and Colonialism*. New York/London: Longman; h. 1–49.
- Kreindler, I. T. (1993), "A Second Missed Opportunity; Russian in Retreat as a Global Language," *International Political Science Review* 14 (3), h. 237–74.
- Lopes, D. (1969), *A expansão da língua Portuguesa no Oriente durante os séculos XVI, XVII e XVIII*. Cetakan perbaikan kedua oleh Luis de Matos. Porto: Portucalense Editoria.
- Neys, K. (1945), *Westerse acculturatie en Oosters volksonderwijs*. Leiden: Luctor et Emergo.
- Nieuwenhuis, G. J. (1923), *Opvoeding tot autonomie: Een sociaal-pedagogische studie van het Philippijnsch onderwijsstelsel, vergeleken met het Nederlandsch-Indische*. Groningen/Den Haag/Weltevreden: Wolters.
- Phillipson, R. (1992), *Linguistic Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Plas, C. O. van der (1944), "Indonesiërs en het Nederlandsch," *Vrij Nederland: Je Maintiendrai* 5 (14), 26 Oktober 1944, h. 438.
- Putte, F. van (1997), "De Nederlandse koloniale taalpolitiek op Benedenwindse Antillen," dalam K. Groeneboer (ed.), *Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba*. Amsterdam: University Press; h. 251–73.
- Rutgers, W. (1997), "De postkoloniale taalsituatie op de Nederlandse Antillen en Aruba," dalam K. Groeneboer (ed.), *Koloniale taalpolitiek in Oost en West: Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba*. Amsterdam: University Press; h. 275–94.
- Schuchardt, H. (1891), *Kreolische Studien IX: Ueber das Malaioportugiesische von Batavia und Tugu-Wina*. Tempsky.
- Sibayan, B. P. (1974), "Language Policy, Language Engineering and Literacy in the Philippines," dalam J. A. Fishman (ed.), *Advances in Language Planning*, Den Haag: Mouton; h. 221–54.
- Sibayan, B. P. dan A. Gonzalez (1996), "Post-imperial English in the Philippines," dalam J. A. Fishman, A. W. Conrad dan A. Rubal-Lopez (ed.), *Post-Imperial English: Status change in Former British and American Colonies, 1940–1990*. Berlin/New York: Mouton de Gruyter; h. 139–72.
- Stephens, M. (ed.) (1978), *Linguistic Minorities in Western Europe*. Llandysul Wales: Gomer Press; cet. II [Cetakan Pertama 1976].
- Swaan, A. de (1993), "'The Emergent World Language System; An Introduction," *International Political Science Review* 14/3, h. 219–26.
- Toorn, M. C. van den (1985), "Het Nederlands in Indonesië," *De Nieuwe Taalgids* 78/1, h. 1–5.
- Uhlenbeck, E. M. (1993), "De dreiging van snelle taalsterfte: Een sinds kort onderkend mondiaal probleem," *Ons Erfdeel* 36 (1), h. 23–31.
- UNESCO (1947), *Fundamental Education; Common Ground for All Peoples*. Paris: UNESCO.
- Verma, Rupalee (1994), "'Indiaas-Engelse' literatuur en de 'Anglo-Indische' literaire traditie," *Indische Letteren* 9 (1), h. 53–63.
- Vries, J. W. de (1993), "Het Nederlands na 2000: een taal van semi-speakers?" *Neerlandica Extra Muros* 31 (2), h. 1–7.
- Walsh, W. (1990), *Indian Literature in English*. London/New York: Longman.
- Wardhaugh, R. (1987), *Languages in Competition; Dominance, Diversity, and Decline*. Oxford/New York: Blackwell.